



► PENINDAKAN KORUPSI

# Tagih Janji KPK, Aktivis Gelar Aksi



## DIY BERSIH DARI KORUPSI ?

### DUGAAN KORUPSI DIY dalam angka\*

**192**

Tercatat ada 192 laporan dugaan korupsi yang diterima KPK.

**26**

Dari total 192 laporan yang masuk, sebanyak 26 di antaranya sudah ditelaah KPK.  
 \*Berdasarkan laporan yang diterima KPK selama 2015-2018



### TIGA INSTANSI TERKORUP\*\*

Kementerian/  
Lembaga  
**287**  
kasus.

Pemerintah  
Kabupaten/Kota  
**234**  
kasus.

Pemerintah  
Provinsi  
**116**  
kasus.



### KORUPSI BERDASARKAN JABATAN \*\*

Anggota DPR  
dan DPRD  
**205**  
orang

Pihak  
swasta  
**198**  
orang

PNS  
**188**  
orang  
\*\*Selama  
2016-2017

sumber: diolah

JOGJA—Sepinya pengungkapan kasus korupsi DIY dari kabar tak membuat para pegiat antirasuah puas. Terlebih berdasarkan data yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 26 laporan dugaan korupsi yang sudah terverifikasi.

Irwan A. Syambudi  
[irwan.syambudi@harianjogja.com](mailto:irwan.syambudi@harianjogja.com)

- Februari lalu, Wakil Ketua KPK sempat mengutarakan adanya 26 laporan dugaan kasus korupsi di DIY yang sudah ditelaah KPK.
- GAKY menuntut KPK konsisten dalam menindak kasus korupsi di DIY.

Belasan aktivis antikorupsi berdemonstrasi di Tugu Pal Putih, Rabu (19/9): Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) ini membawa spanduk bertuliskan *Dukung KPK Pecah Telur Penindakan Kasus Korupsi di Propinsi DIY*.

Tak hanya itu, poster bergambar peta Indonesia dengan fokus utama peta DIY dan bertuliskan *Selamat Datang KPK dan #Jogja Kangen Pecah Telur Penindakan KPK* pun turut dibawa.

Rombongan berorasi sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan ditutup dengan *long march* menuju ke arah Gondolayu.

● Lebih Lengkap Halaman 10



**Aktivist yang** tergabung dalam Gerakan Antikorupsi Yogyakarta (GAKY) membawa spanduk bertuliskan *Dukung KPK Pecah Telur Penindakan Kasus Korupsi di Propinsi DIY* saat menggelar aksi di Tugu Pal Putih, Jogja, Rabu (19/9).

**Tagih Janji...**

Koordinator GAKY, Tri Wahyu mengatakan saat berkunjung ke DIY pada 28 Februari lalu, Wakil Ketua KPK, La Ode M. Syarif sempat mengatakan ada 192 laporan kasus korupsi di DIY. Dari jumlah tersebut 26 di antaranya sudah terverifikasi dan dalam proses penyelidikan KPK.

Namun hingga enam bulan pascapernyataan itu belum ada satu pun penindakan yang dilakukan oleh KPK. "Kami meminta keseriusan KPK untuk melakukan penindakan kasus korupsi di DIY dan juga sekaligus menjalankan mandat sesuai Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KPK wilayah kerja KPK adalah seluruh wilayah Indonesia termasuk di DIY," kata dia di sela-sela aksi.

Tri menyebut ada sejumlah kasus yang seharusnya layak ditangani oleh KPK. Kasus itu di antaranya adalah kasus korupsi pengadaan CDMA di DIY senilai Rp17 miliar; kasus korupsi dana hibah Rp 12,5 miliar Persiba Bantul; kasus korupsi *Trans Jogja*; dan ada pula kasus penyuntatan dana kompensasi dari pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

"Bahkan Ketua KPK di era sebelumnya pernah menyebut adanya aroma korupsi dalam perizinan hotel di Jogja. Tetapi lagi-lagi, KPK tak pernah sekalipun

menindak kasus korupsi di DIY. Untuk itu, GAKY mendukung penuh KPK untuk pecah telur penindakan kasus korupsi di DIY," ujarnya.

Selama ini KPK menurut dia sudah cukup sering datang ke DIY untuk menggelar seminar dan diskusi tentang pencegahan korupsi. Namun KPK nyatanya belum pernah sekali pun menindak kasus rasuah di DIY sejak lembaga antikorupsi itu berdiri 16 tahun silam.

Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan mengakui penindakan kasus korupsi sejauh ini memang sangat lambat. Selain nyaris tidak pernah dilakukannya penegakan hukum soal delik suap di daerah, masyarakat kini juga kian apatis terhadap dugaan kasus korupsi.

Delik suap yang berhubungan dengan swasta itu ada dalam UU No.11/1980 [tentang Tindak Pidana Suap], dan hampir tidak pernah digunakan. Masyarakat sekarang juga semakin enggan untuk melaporkan [kasus korupsi], mereka banyak yang maklum dan bingung harus melapor ke mana," kata dia saat menjadi pembicara dalam *Diskusi Generasi Muda Antikorupsi bertajuk Pelopor Perubahan Bangsa di Era Milenial* di Auditorium Kampus 2 Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rabu.

(M18/M17)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005